



MENDESAK SIME DARBY UNTUK MENYELESAIKAN KONFLIK PERAMPASAN TANAH YANG BERKEPANJANGAN SEBELUM PENDAFTARAN DIVISI PERKEBUNANNYA DI BURSA SAHAM.

Sime Darby dilaporkan sedang mempersiapkan pendaftaran sejumlah anak perusahaan di bursa saham Asia pada awal tahun 2017. Diperkirakan divisi perkebunan Sime Darby adalah salah satu divisi yang akan didaftarkan – divisi perkebunan Sime Darby menghasilkan lebih dari seperempat pendapatannya dan sepertiga dari keuntungan yang perusahaan hasilkan.¹ Salah satu anak perusahaan perkebunan sawit Sime Darby di Indonesia sedang berkonflik dengan beberapa komunitas masyarakat adat, masyarakat memiliki beberapa tuntutan terhadap perusahaan, termasuk perampasan tanah adat dan oleh Sime darby dimasukkan kedalam wilayah perkebunannya tanpa *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*. Sebelum pendaftaran apapun dilakukan, masyarakat yang terkena dampak atas kasus ini dan juga organisasi masyarakat sipil mendesak bank-bank dan investor penyandang dana Sime Darby untuk menyelesaikan semua konflik dengan masyarakat dan memastikan hak-hak masyarakat dilindungi dan dihormati.

Sime Darby adalah salah satu perusahaan sawit terbesar di dunia dan memproduksi sekitar 16% dari seluruh sawit yang tersertifikasi di RSPO.² Perusahaan Sime Darby sendiri selalu bangga dengan praktik tanggung jawab sosialnya dan telah menjadi anggota RSPO sejak tahun 2004; juga sebagai salah satu penandatanganan *United Nations Global Compact and the New York Declaration on Forests*.³ Pada bulan September 2016 Sime Darby mengeluarkan *Responsible Agriculture Charter*⁴ dan mengumumkan tujuannya untuk bergabung dengan *the Palm Oil Innovation Group (POIG)*.⁵ Pada bulan Desember 2016, Sime Darby menandatangani *the High Carbon Stock Convergence Agreement*, yang menggaris bawahi elemen mendasar dari satu aturan untuk mengimplementasikan komitmennya untuk “tidak melakukan pengrusakan hutan” dan melakukan proses *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* secara serius untuk pengakuan hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal.⁶

Terlepas dari komitmen untuk melakukan praktek bisnis yang bertanggungjawab, Sime Darby belum secara serius melakukan upaya penyelesaian atas berbagai pelanggaran terhadap hak atas tanah masyarakat adat yang melibatkan anak perusahaannya PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS), Provinsi Kalimantan Barat – Indonesia. PT MAS telah beroperasi di atas tanah masyarakat adat seluas 1,462 ha sejak tahun 1995 tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat sesuai dengan Prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*. Pada tahun 2012, masyarakat mengajukan tuntutan ke RSPO, yang sampai lima tahun kemudian tetap tidak terselesaikan. Beberapa upaya terkini yang dilakukan oleh masyarakat dan organisasi masyarakat sipil tahun 2015 dan 2016 untuk pemetaan partisipatoris dan pengembalian tanah adat belum mendapatkan respon yang memadai.⁷

Berikut ialah aduan masyarakat untuk PT MAS, anak perusahaan Sime Darby:

- Menggarap tanah masyarakat adat di Kalimantan Barat sejak 1995, tanpa memperoleh persetujuan dari masyarakat sesuai dengan Prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)*
- Kurangnya transparansi tentang status tanah dan perjanjian kerjasama.

- Gagal menindaklanjuti janji terkait pembangunan infrastruktur.
- Tidak mematuhi peraturan daerah tentang kebun plasma.
- Melanggar Prinsip dan Kriteria RSPO 2.2, yg mewajibkan perusahaan bahwa "hak menggunakan tanah dibuktikan, dan tidak dituntut secara sah oleh masyarakat lokal yg dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki hak hukum, hak adat atau hak pakai."

Lembar fakta terkait kasus konflik yang dipublikasikan oleh TuK INDONESIA dapat ditemukan [disini](#)ⁱ. Pernyataan dari Sime Darby yang merespon lembar fakta TuK Indonesia dapat ditemukan [disini](#). Ringkasan informasi pengaduan ke RSPO dapat ditemukan [disini](#) dan status negosiasi penyelesaian sengketa dapat ditemukan [disini](#).

Penyandang dana utama Sime Darby⁸ dan para investor,⁹ sebagaimana tercantum dibawah ini, kemungkinan akan didekati untuk menjadi penjamin emisi dan/atau pemegang saham pada perusahaan perkebunan mereka. Beberapa institusi ini (termasuk HSBC, Standard Chartered, Citigroup, Dana Pensiun Pemerintah Norwegia dan *Pensioenfondz Zorg & Welzijn*) memilki berbagai kebijakan untuk mencegah mereka memberikan layanan pendanaan untuk perusahaan yang terlibat dalam kerusakan lingkungan dan sosial, seperti pelanggaran hak atas tanah.

REKOMENDASI

Sime Darby dengan segera harus menyelesaikan permasalahan antara PT MAS dengan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat.

Bank dan investor harus mewajibkan Sime Darby untuk terlebih dahulu menyelesaikan tuntutan masyarakat korban dari PT MAS, sebagai prasyarat keterlibatan mereka dalam daftar manapun atau perjanjian pendanaan dimasa depan dengan perusahaan.

Tabel 1: Hutang dan Penjamin Emisi berdasarkan tipe pendanaan (Juta US\$, 2009-2016 September)

Penyandang Dana	Negara	Penerbitan Obligasi	Hutang Perusahaan	Fasilitas Kredit Bergulir	Penerbitan Saham	Total (juta US\$)
Malayan Banking	Malaysia	1,491	100		590	2,181
CIMB Group	Malaysia	376				376
Public Bank	Malaysia	326				326
OCBC	Singapore		220	80		300
Mizuho Financial	Japan		170	110		280
HSBC	United Kingdom	75	90	60		225
Mitsubishi UFJ Financial	Japan		120	80		200
Standard Chartered	United Kingdom	75	90	10		175
ANZ	Australia		130	10		140
Citigroup	United States	75				75
Hong Leong Company	Malaysia	50				50
Total		2,469	920	350	590	4,329

i Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: Rahmawati Retno Winarni, TuK Indonesia Executive Director, wiwin@tuk.or.id, tel: + 62 21 835 2955

Tabel 2: Obligasi dan Pemegang Saham (juta US\$, laporan terkini September 2016)

Investor	Negara	Nilai (dalam juta US\$)
Employees Provident Fund	Malaysia	1,305
KWAP Retirement Fund	Malaysia	366
Malaysian Hajj Pilgrims Fund	Malaysia	285
Public Mutual	Malaysia	242
Vanguard	United States	98
BlackRock	United States	95
GIC	Singapore	92
Prudential (UK)	United Kingdom	77
Oversea-Chinese Banking Corporation	Singapore	73
Norwegian Government Pension Fund - Global	Norway	48
Dimensional Fund Advisors	United States	26
Pensioenfonds Zorg & Welzijn	Netherlands	21
CIMB Group	Malaysia	20
JPMorgan Chase	United States	20
Deutsche Bank	Germany	15
Total		2,784

(Endnotes)

1. Sime Darby (2016, October), *Innovating the Future: Annual Report 2016*, p. 7; Lee, L. (2016, November 25), "Malaysia's Sime Darby could list its plantations division", online: <http://www.reuters.com/article/sime-drby-results-idUSL4N1DQ2SB>, viewed in November 2016. Some analysts have also indicated that a demerger of its plantation division is a likely scenario.
2. RSPO, 30 September 2016. "Certified Growers". Online: <http://www.rspo.org/certification/certified-growers>
3. Sime Darby website, (n.d), "Performance Highlights", online: www.simedarby.com/sustainability/performance-highlights/performance-highlights
4. Sime Darby, (21/09/2016), Press Release: "Sime Darby Plantation launches responsible agriculture charter", online: <http://www.simedarby.com/media/press-release/sime-darby-plantation-launches-responsible-agriculture-charter>
5. Sime Darby, (21/09/2016), Press Release: "Sime Darby Plantation launches responsible agriculture charter", online: <http://www.simedarby.com/media/press-release/sime-darby-plantation-launches-responsible-agriculture-charter>
6. <http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2016/11/Final-HCS-Convergence-Agreement-.pdf>
7. http://www.rspo.org/acop/2015/sime-darby-plantation-sdn-bhd/progress-report_pt-mas.pdf
8. To explore the data, see: <http://forestsandfinance.org/?explore=AC0.YYYYKKB.KB.KKKKB.kkk1ke.E.KF.F.G#sthash.2QAJLEYI>
9. To explore the data, see: <http://forestsandfinance.org/?explore=ac1.YYYYYYYYYYKK1.KB.KKKKB.kkk1ke.E.KF.F.G>